



Analisis Implementasi Penggunaan SAKIP dalam Mewujudkan *Good Governance* pada BNPT RI

Tuti Hasanah. tutihanahbnpt@gmail.com

Umi Rusilowati. dosen00061@unpam.ac.id

N. Lilis Suryani. dosen00437@unpam.ac.id

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Pamulang.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumentasi. Informan terdiri atas pejabat Eselon II, Eselon III, pejabat fungsional muda, dan auditor internal BNPT yang dipilih secara *purposive*. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di BNPT belum optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum adanya sistem e-SAKIP, serta lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Namun, BNPT menunjukkan komitmen kuat melalui penguatan sistem monitoring, peningkatan kapasitas pegawai, dan koordinasi lintas unit. Secara keseluruhan, penerapan SAKIP berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi BNPT, meskipun masih memerlukan langkah strategis lanjutan agar prinsip *good governance* dapat terwujud secara menyeluruh.

Kata Kunci: SAKIP; *Good Governance*; BNPT; Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) in realizing the principles of good governance within the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT). This qualitative descriptive research uses in-depth interviews, direct observations, and document studies as data collection techniques. The informants consisted of echelon II, echelon III, young functional officials, and internal auditors selected through purposive sampling. Data were analyzed using thematic analysis and validated through triangulation. The results indicate that the implementation of SAKIP within BNPT has not been fully optimized due to limited human resource capacity, lack of an integrated e-SAKIP system, and weak synchronization between planning and budgeting. Nevertheless, BNPT has shown strong commitment through internal monitoring systems, staff capacity building, and improved coordination. Overall, SAKIP contributes positively to enhancing BNPT's accountability and transparency but requires further strategic improvements to achieve comprehensive good governance.

Keywords: SAKIP; *Good Governance*; BNPT; Accountability; Transparency; Effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Salah satu instrumen strategis yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara sistematis dan berorientasi pada hasil (*result-based management*). Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan mampu menilai kinerja secara objektif dan terukur, sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, muncul konsep *good governance* yang semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir sebagai kerangka ideal penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Saputra dan Nugroho (2021), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan demikian, *good governance* dapat dipahami sebagai tata kelola yang menekankan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi di sektor publik.

Keterkaitan antara konsep *good governance* dan SAKIP sangat erat, karena implementasi SAKIP menjadi sarana utama pemerintah dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ke dalam praktik birokrasi. Suwarno dan Marwanto (2021) menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan SAKIP mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai wujud nyata dari pelaksanaan *good governance*. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SAKIP tidak hanya menggambarkan peningkatan kinerja internal instansi pemerintah, tetapi juga menunjukkan sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik telah dioperasionalkan.

Selanjutnya, Andriani et al. (2015) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi kepada publik. Sistem ini mencakup empat komponen utama, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan hasil kerja. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa tujuan utama SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai prasyarat menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya.

Dalam konteks evaluasi kinerja pemerintahan, peran legislatif juga memiliki relevansi penting. Menurut Sri Lestari dan Roy Valiant Salomo (2022), ukuran kinerja digunakan oleh lembaga legislatif untuk menilai kelayakan biaya pelayanan (*cost of service*) yang dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat tidak menghendaki adanya pungutan yang terus-menerus tanpa disertai peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik agar dapat memberikan lebih banyak manfaat dengan biaya yang lebih hemat (*do more with less*). Karena karakteristik sektor publik yang bersifat multidimensi dan menghasilkan output yang sebagian besar tidak berwujud (*intangible*), maka ukuran finansial saja tidak cukup. Diperlukan pula ukuran kinerja non finansial agar penilaian terhadap kinerja sektor publik menjadi lebih komprehensif.



Dalam kerangka tersebut, penerapan SAKIP di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi sangat strategis. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab besar dalam kebijakan penanggulangan terorisme nasional, BNPT dituntut untuk mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif serta akuntabel. Melalui penerapan SAKIP, BNPT diharapkan dapat memastikan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di lingkungan BNPT masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi sistem. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja, belum tersedianya sistem e-SAKIP sebagai sarana digitalisasi pelaporan, serta belum sinkronnya hubungan antara perencanaan dan penganggaran antar unit kerja. Selain itu, budaya kerja birokratis yang masih berorientasi pada proses administratif turut menjadi tantangan dalam membangun sistem kinerja berbasis hasil (*result-based management*).

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu *good governance* sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan modern, muncul kebutuhan untuk menilai sejauh mana implementasi SAKIP benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Akbar (2016) menegaskan bahwa penerapan SAKIP yang efektif merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat praktik *good governance* di instansi pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih jauh bagaimana pelaksanaan SAKIP di BNPT dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan implementasi SAKIP di BNPT belum berjalan optimal, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi langkah-langkah strategis yang telah ditempuh BNPT dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana penerapan SAKIP berkontribusi terhadap terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan BNPT.

B. KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur dalam penelitian ini mencakup lima konsep utama yang menjadi dasar analisis, yaitu teori manajemen, teori manajemen sumber daya manusia, teori SAKIP, teori *good governance*, dan teori institusional. Teori-teori tersebut digunakan untuk membangun kerangka berpikir yang menjelaskan keterkaitan antara implementasi SAKIP dengan upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan BNPT. Dengan mengintegrasikan kelima teori tersebut, penelitian ini berupaya menilai bagaimana kebijakan akuntabilitas kinerja mampu memperkuat tata kelola organisasi publik secara efektif dan efisien.

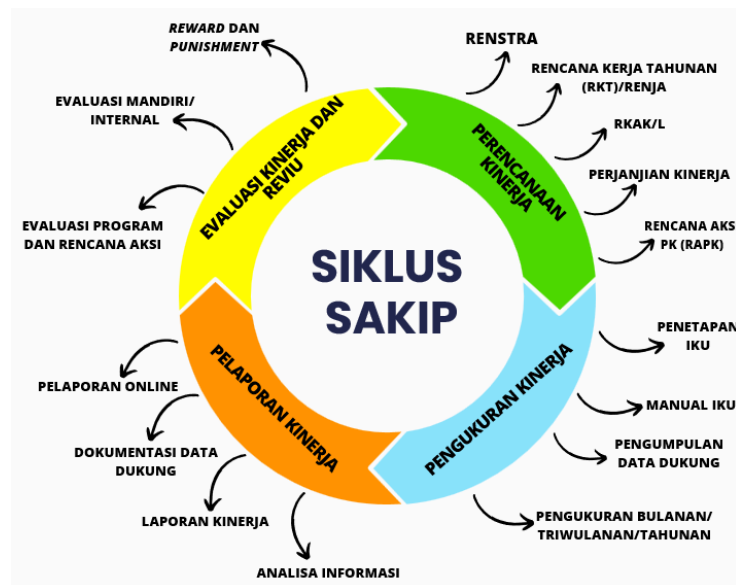
Menurut Wibowo (2016), manajemen adalah suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi dalam penggunaan seluruh sumber daya termasuk SDM, fisik, dan finansial agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses ini tidak hanya mengarahkan pengelolaan aset organisasi, tetapi juga membangun kerja sama dan meningkatkan efektivitas tim dalam mencapai hasil optimal. Dalam konteks penelitian ini, teori manajemen digunakan untuk memahami bagaimana BNPT mengelola seluruh sumber daya organisasi melalui penerapan SAKIP, mulai dari tahap



perencanaan kinerja hingga pelaporan hasil kerja. Keberhasilan penerapan SAKIP tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kemampuan manajerial dalam mengoordinasikan berbagai unit kerja agar selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Selanjutnya, teori manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Dessler (2017) dan Hasibuan (2016) menekankan bahwa SDM merupakan aset utama organisasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi SAKIP, peran SDM sangat penting dalam mengelola data kinerja, menyusun laporan akuntabilitas, serta melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan. Keterbatasan kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap sistem kinerja dapat menjadi kendala dalam penerapan SAKIP secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan menjadi faktor krusial untuk memperkuat efektivitas sistem ini.

Teori SAKIP berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem terpadu yang mencakup proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja instansi pemerintah. Tujuan utama dari penerapan SAKIP adalah mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), bukan sekadar berfokus pada proses administratif semata. Melalui sistem ini, instansi pemerintah seperti BNPT diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip *value for money*, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Secara konseptual, SAKIP terdiri atas empat komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Keempat komponen ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara objektif serta terarah pada pencapaian tujuan strategis organisasi.



Gambar 1. Siklus SAKIP

Teori *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997) dan Sedarmayanti (2012) menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana lembaga publik mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi SAKIP memiliki peran penting karena sistem tersebut memungkinkan setiap instansi untuk mengukur kinerja secara objektif, terbuka, dan terarah pada pencapaian tujuan strategis yang berdampak langsung bagi publik. Melalui penerapan SAKIP, instansi pemerintah seperti BNPT dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap hasil yang diharapkan. Menurut Mardiasmo (2015) dalam kutipan yang disampaikan oleh World Bank, *good governance* diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Konsep ini menekankan pentingnya pencegahan terhadap salah alokasi dana investasi, praktik korupsi baik di tingkat politik maupun administratif, penerapan disiplin anggaran, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi dan usaha.

Sementara itu, teori institusional yang dikemukakan oleh Scott (2001) menjelaskan bahwa organisasi publik sering kali menyesuaikan struktur dan praktiknya sebagai bentuk respons terhadap tekanan regulatif, normatif, dan kognitif dari lingkungan eksternal. Dalam konteks BNPT, penerapan SAKIP dapat dipandang sebagai upaya institusional untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi serta regulasi pemerintah yang mengharuskan adanya sistem akuntabilitas yang terukur dan terstandar. Tekanan tersebut mendorong BNPT untuk mengadopsi praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk legitimasi dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas publik. Dengan demikian, SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme institusional yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi SAKIP dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan BNPT. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif proses, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan SAKIP berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di kantor pusat BNPT, dengan fokus pada unit-unit kerja yang berperan langsung dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi pejabat struktural (Eselon II dan III), pejabat fungsional muda, serta auditor internal BNPT. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik implementasi SAKIP dalam aktivitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sementara itu, telaah dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen resmi, seperti laporan kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja, serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber



dikategorikan dan dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Validasi hasil penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik guna memastikan keabsahan data serta meningkatkan kredibilitas temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan interpretasi yang objektif, mendalam, dan sesuai dengan konteks implementasi SAKIP di lingkungan BNPT.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan SAKIP di lingkungan BNPT telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Penerapan SAKIP di BNPT dilaksanakan berdasarkan pedoman Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015, yang menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem ini belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sistem informasi, maupun koordinasi antar unit kerja.

Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan SAKIP di BNPT adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan konsep manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*). Selain itu, BNPT belum memiliki sistem e-SAKIP yang berfungsi sebagai sarana digitalisasi dan integrasi pelaporan kinerja secara elektronik. Ketidadaan sistem digital ini menyebabkan proses pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan data dan keterlambatan dalam proses evaluasi. Lebih jauh, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran antar unit kerja belum sepenuhnya selaras, yang mengakibatkan beberapa program belum dapat diukur kontribusinya terhadap sasaran strategis lembaga.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Engkus et al. (2023) yang menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan hasil dari proses penilaian yang sistematis berdasarkan serangkaian indikator kegiatan, meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dalam praktiknya, pemerintah membutuhkan informasi akuntansi yang akurat untuk menetapkan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian capaian kinerja. Tanpa indikator yang jelas dan terukur, proses evaluasi kinerja akan sulit dilakukan secara efektif dan objektif. Temuan ini memperkuat fakta bahwa BNPT perlu memperbaiki sistem pengukuran kinerja agar seluruh program dapat dinilai secara komprehensif sesuai prinsip akuntabilitas.

Sebagai langkah perbaikan, BNPT telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat implementasi SAKIP. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pegawai, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala, serta optimalisasi koordinasi antar unit kerja. Selain itu, peran Inspektorat BNPT juga semakin ditingkatkan dalam melakukan reviu terhadap pelaporan kinerja guna memastikan kesesuaian antara target dan realisasi capaian. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip manajemen kinerja yang dikemukakan oleh Wibowo (2016) dan Dessler (2017), yang menekankan pentingnya siklus perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi berkelanjutan sebagai instrumen peningkatan efektivitas organisasi.

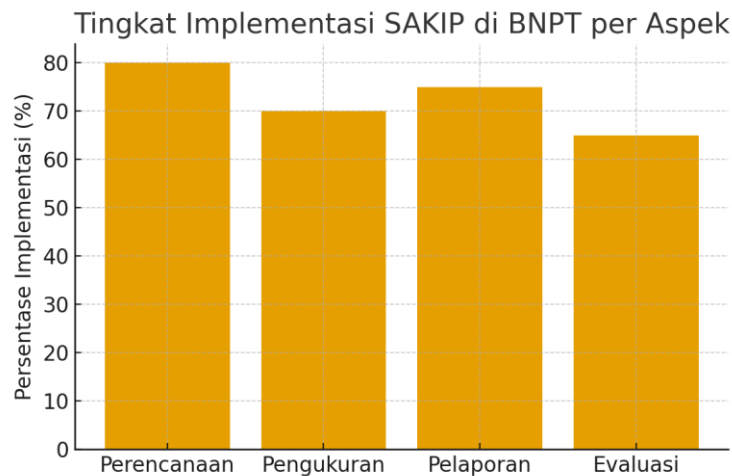
Tabel berikut menggambarkan hasil temuan utama mengenai kondisi aktual implementasi SAKIP di BNPT, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan:

Tabel 1. Hasil Temuan Utama Implementasi SAKIP di BNPT

No.	Aspek Implementasi SAKIP	Kondisi Aktual	Kendala Utama	Upaya Perbaikan
1	Perencanaan Kinerja	Telah mengacu pada Renstra dan Perjanjian Kinerja	Belum sepenuhnya terukur dengan indikator <i>output</i> dan <i>outcome</i>	Penyusunan indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur
2	Pengukuran Kinerja	Menggunakan format LAKIP tahunan	Belum ada sistem e-SAKIP untuk integrasi data	Pengembangan sistem pelaporan berbasis digital
3	Pelaporan Kinerja	Dilakukan setiap triwulan dan tahunan	Proses masih manual dan kurang efisien	Pelatihan pegawai dan standarisasi format pelaporan
4	Evaluasi dan Reviu	Dilaksanakan oleh Inspektorat BNPT	Belum menyeluruh ke seluruh unit kerja	Penguatan fungsi monitoring dan supervisi lintas unit

Sumber: Hasil olahan data penelitian (2025)

Pembahasan hasil menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di BNPT memiliki relevansi kuat dengan teori *good governance* (UNDP, 1997; Sedarmayanti, 2012) yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Melalui penerapan SAKIP, BNPT telah memperkuat mekanisme pertanggungjawaban publik dan meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi. Selain itu, berdasarkan teori institusional (Scott, 2001), penerapan SAKIP di BNPT juga dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap tekanan regulatif dan normatif dari lingkungan eksternal, khususnya Kementerian PAN-RB, yang menuntut pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun masih menghadapi kendala teknis dan struktural, implementasi SAKIP telah menjadi fondasi penting dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja dan mempercepat terwujudnya *good governance* di lingkungan BNPT.



Gambar 2. Tingkat Implementasi SAKIP di BNPT

Implementasi SAKIP di BNPT telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi, namun masih menghadapi kendala keterbatasan SDM, sistem digital, dan koordinasi antar unit. Diperlukan peningkatan kapasitas pegawai, pengembangan e-SAKIP, serta penguatan koordinasi lintas unit agar tata kelola pemerintahan di BNPT menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Implementasi SAKIP di lingkungan BNPT telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Penerapan SAKIP terbukti memperkuat mekanisme perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum tersedianya sistem e-SAKIP yang terintegrasi, serta lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran antar unit kerja.

Kendala tersebut menandakan perlunya upaya berkelanjutan dalam memperkuat penerapan SAKIP agar lebih efektif dan efisien. BNPT perlu mempercepat digitalisasi sistem pelaporan melalui e-SAKIP, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis yang berkesinambungan, serta memperkuat koordinasi lintas unit kerja untuk memastikan keterpaduan antara target dan realisasi kinerja. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan SAKIP dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penguatan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memperkuat penerapan prinsip *good governance* di lingkungan BNPT.

SARAN

Untuk mengoptimalkan implementasi SAKIP, BNPT perlu melakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan, mempercepat pengembangan sistem e-SAKIP yang terintegrasi, serta memperkuat koordinasi lintas unit

agar proses perencanaan dan evaluasi kinerja berjalan efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan dan revaluasi pelaksanaan SAKIP guna memastikan kesesuaian antara target dan hasil, sehingga prinsip *good governance* dapat terwujud secara menyeluruh di lingkungan BNPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nurdian. (2020). Pengaruh Implementasi SAKIP terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya). JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. ISSN 2355-7478. Vol. 4. No. 1, September 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/v4i1.3394>.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Politeknik Negeri 51-60. Padang. Akuntansi Dan Manajemen, 10(2), <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.105>.
- Dessler, G. (2017). *Human Resource Management*. New York: Pearson Education.
- Engkus, Zahra, A., Yusmi, A. J., & Maulida, D. (2023). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 18-26. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.146>
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana *good governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 1-17.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
- Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). *Good Governance* Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(1), 11-26. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559>.
- Scott, W. R. (2001). *Institutions and Organizations*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri Lestari, & Roy Valiant Salomo. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>.
- Suwarno, S., & Marwanto, H. (2021). Pengaruh Penerapan SAKIP Terhadap Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel *Intervening*. Jurnal Ilmu Sosial. Politik Dan Pemerintahan, 9(2), <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1508>.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja (Edisi Kelima). Jakarta: Rajawali Pers.